



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MELEMAHNYA UPAYA DAMAI DI SEMENANJUNG KOREA

Rizki Roza

Analisis Legislatif Ahli Madya
rizki.roza@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) melakukan latihan militer bersama sejak 4 Maret hingga 14 Maret 2024. Latihan militer "Freedom Shield" ini merupakan latihan musim semi tahunan yang dilakukan kedua negara. Latihan yang dilaksanakan selama 11 hari ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak Pyongyang membatalkan pakta militer antar-Korea yang pernah mereka sepakati pada 2018 untuk meredakan ketegangan. Namun, latihan kali ini melibatkan jumlah pasukan dua kali lipat dibanding sebelumnya. Fokus latihan ini adalah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi Korea Utara (Korut), termasuk membangun kemampuan menetralisasi ancaman nuklir Korut, dan kemampuan mengidentifikasi dan menyerang rudal jelajah Korut. Bagi Korsel dan AS, latihan tersebut bersifat defensif dan merupakan respon terhadap berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh Korut.

Di sisi lain, Pyongyang mengecam keras dan menyatakan penolakannya terhadap latihan militer tersebut. Kementerian Pertahanan Korut menganggap latihan itu sebagai tindakan yang memicu ketegangan, dan mendesak penghentian latihan dengan segera. Kementerian Pertahanan Korut bahkan melihat latihan itu bukan sebagai langkah defensif, melainkan tindakan yang bertujuan untuk menyerang Korut. Dengan peningkatan skala latihan, Korut menganggapnya sebagai ancaman serius dan sebagai latihan perang nuklir. Korut memperingatkan konsekuensi dari langkah AS dan Korsel itu, termasuk risiko memicu perang nuklir.

Merespon latihan bersama yang dilakukan Korsel dan AS, Korut kemudian juga menggelar demonstrasi militer dan latihan tempur. Presiden Kim Jong-Un terlibat langsung dengan mengendarai tank tempur baru untuk unjuk kekuatan terbaru mereka. Sebelumnya, Kim juga ikut memandu latihan penembakan artileri yang dilakukan oleh unit-unit tentara rakyat Korea di dekat perbatasan yang berada dalam jangkauan tembak ke ibu kota Korsel.

Hubungan kedua negara terus memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan Kim Jong-Un pada 15 Januari 2024 yang menyebutkan bahwa Korut tidak akan lagi mengupayakan reunifikasi dengan Korsel merupakan puncak memburuknya hubungan kedua Korea. Dalam pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi di Pyongyang, Presiden Kim Jong-Un mengatakan reunifikasi Korut dan Korsel tidak akan mungkin lagi terjadi. Kim berjanji akan menghancurkan monumen reunifikasi yang dulu dibangun oleh ayahnya di Pyongyang. Kim menegaskan Korsel sebagai "musuh utama", dan upaya untuk berdamai dan bersatu kembali dengan Korsel adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh dilakukan.

Kemudian Korut juga secara resmi mengumumkan penghapusan beberapa lembaga penting pemerintah yang bertugas mendorong penyatuan dengan Korsel. Selama ini urusan hubungan diplomatik antara kedua negara ditangani oleh Kementerian Unifikasi Seoul dan Komite Reunifikasi Damai Pyongyang. Ini menjadi salah satu lembaga yang dinyatakan dihapuskan oleh Majelis Rakyat Tertinggi Korut. Perkembangan ini membawa Semenanjung Korea pada situasi yang semakin berbahaya. Pengamat bahkan menyebut kondisi saat ini paling berbahaya dibanding kondisi lainnya sejak dimulainya Perang Korea.

Di tengah hubungan yang memburuk antara dua pihak, sebagian pengamat meyakini bahwa Korut tidak akan merealisasikan ancaman-ancamannya. Tindakan-tindakan Kim Jong-Un dianggap sebagai upaya untuk menjaga ketegangan tetap tinggi. Sebagian pengamat menilai, Korut tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melancarkan perang yang direncanakan. Korut dinilai belum memiliki senjata konvensional yang sebanding dengan Korsel, dan Korut juga tidak memiliki cadangan makanan dan minyak untuk kembali masuk ke dalam situasi perang. Peningkatan hubungan Korut dengan Rusia dan China juga dianggap belum cukup untuk memberi dukungan kepada Korut untuk menempuh jalan perang. Kondisi yang paling dikhawatirkan adalah insiden yang tidak disengaja dan menjadi tidak terkendali akibat respons yang berlebihan atas setiap provokasi yang dilakukan masing-masing pihak.

Atensi DPR

Perkembangan di Semenanjung Korea menjadi perhatian masyarakat internasional. Masyarakat internasional mengamati dengan cemas dan berharap agar ketegangan dapat diselesaikan dengan cara damai dan diplomatis. Indonesia bersama masyarakat internasional harus turut mengupayakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Komisi I melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji setiap alternatif strategi diplomasi yang mungkin dilakukan Indonesia untuk turut meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Komisi I bersama pemerintah perlu terus menyuarakan dan mengingatkan setiap pihak yang berkepentingan di Semenanjung Korea untuk menahan diri, mengedepankan dialog dan cara-cara damai, dan menghentikan langkah-langkah provokatif yang melibatkan kekuatan militer. Melalui peran diplomasi parlemen, DPR RI juga dapat mendorong lebih banyak pihak untuk bersama-sama mengupayakan kembali upaya perdamaian di Semenanjung Korea yang telah mengalami kebuntuan dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber

cnn.com, 4 Maret 2024;
foreignaffairs.com, 30 Januari 2024;
ipdefenseforum.com, 8 Maret 2024;
kompas.com, 16 Maret 2024;
straitstimes.com, 16 Januari 2024;
thediplomat.com, 12 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024